BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli air minum isi ulang dari depot air minum yang tidak sesuai dengan standar mutu yang berlaku sudah diatur dalam Undang - undang Perlindungan Konsumen, salah satunya adalah terkait Hak dan Kewajiban pelaku usaha dan konsumen. Selain perlindungan hukum yang tercantum dalam Undang - undang Perlindungan Konsumen, tercantum juga dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, bahwa Setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksi aman untuk dikonsumsi, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 15 Permenkes Nomor 43 Tahun 2014 menjelaskan bahwa setiap depot air minum isi ulang wajib menyediakan informasi terkait alur pengelolaan air minum, masa kadaluarsa alat disinfeksi, waktu penggantian, pembersihan filter dan sumber kualitas air baku yang digunakan oleh depot air minum tersebut, selain itu sertifikat laik higiene sanitasi juga harus dipasang di tempat yang terlihat dan mudah dibaca oleh konsumen, tujuannya agar konsumen mendapatkan akses terkait informasi produk yang dijual oleh pelaku usaha, agar nantinya konsumen dapat memilih produk tersebut layak atau tidak untuk dikonsumsi.
2. Adapun bentuk terkait penegakan hukum dari pemerintah terhadap pelaku usaha depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi kewajiban atau tanggung jawab sebagai pelaku usaha adalah dengan melakukan pembinaan, pengendalian serta pemantauan terhadap pelaksanaan pengawasan kualitas air minum. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010, bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya pengawasan kualitas air minum. Dijelaskan juga dalam Pasal 4 Peraturan

3. Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010, bahwa untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat harus dilakukan pengawasan kualitas air minum secara eksternal dan secara internal. Dalam rangka pengawasan ini Dinas Kesehatan atau pemerintah dapat memberikan sanksi terhadap depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi persyaratan administrasi terkait hygiene sanitasi, seperti sanksi administratif yang sudah tertuang dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 dan apabila terjadi kejadian yang luar biasa, seperti kejadian yang menimbulkan keracunan karena mengkonsumsi air minum dari depot air minum yang tidak sesuai dengan standar mutu, maka pelaku usaha atau pengurusnya akan dikenakan sanksi pidana dan bagi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab seperti ganti rugi, maka pelaku usaha tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 60 dan Pasal 61 Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil dan analisis yang telah dibuat, penulis ingin memberikan saran terkait depot air minum isi ulang yang tidak sesuai dengan standar mutu yang berlaku, khususnya bagi pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen. Dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen,

1. Bagi Pemerintah, disarankan untuk lebih meningkatkan dan memaksimalkan terkait perlindungan hukum terhadap konsumen khususnya pada depot air minum isi ulang yang tidak sesuai dengan standar mutu yang berlaku, serta diharapkan pemerintah dapat melakukan koordinasi yang baik antar instansi yang berwenang dengan tujuan untuk memberikan kejelasan terkait izin dan instansi mana yang berhak untuk memberikan sanksi kepada depot yang tidak sesuai dengan standar kualitas air minum dan pemerintah juga diharapkan untuk dapat memberikan sanksi yang lebih tegas kepada setiap pelaku usaha yang

sudah melanggar, agar menimbulkan efek jera kepada setiap pelaku usaha yang melanggar dan untuk mengurangi kerugian kerugian atau pelanggaran yang dialami oleh konsumen.

2. Bagi pelaku usaha, disarankan untuk selalu jujur dalam melakukan kegiatan usahanya dan juga disarankan untuk mengetahui terlebih dahulu terkait ketentuan yang berlaku dan berhubungan dengan barang atau jasa yang ingin ia jadikan sebagai ladang usahanya. Teutama mengenai hak hak konsumen dan kewajibannya sebagai pelaku usaha, sebagaimana yang tercantum dalam Undang undang Perlindungan Konsumen, diantaranya seperti setiap pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas dan benar terkait dengan produk atau jasa yang diperdagangkan tersebut.
3. Bagi Konsumen, disarankan bagi konsumen untuk lebih cerdas dalam memilih produk yang ingin dikonsumsi, khususnya yang berhubungan dengan kesehatan. Disarankan juga untuk setiap konsumen untuk jangan mudah tergiur dengan label harga yang lebih murah, karena dengan harga yang dicantumkan belum tentu sehat dan layak untuk dikonsumsi, oleh karena itu sebelum membeli suatu produk, konsumen harus mencari informasi terlebih dahulu apakah produk yang dijualnya sudah sesuai dengan standar mutu yang berlaku atau belum, khususnya terkait depot air minum isi ulang apakah sudah memiliki izin usaha atau sertifikat laik higiene sanitasi atau belum. Apabila depot tersebut belum memiliki sertifikat laik higiene sanitasi maka segera laporkan kepada Dinas Kesehatan untuk dapat diberikan teguran dan diperiksa terkait kualitas air minumnya.